

KARYA USAHA MANDIRI (KUM)

Suatu Model Alternatif Skim Kredit untuk Golongan Miskin di Pedesaan Indonesia

Oleh:
Mat Syukur*)

Abstrak

KUM adalah suatu kaji tindak (action research) Skim Kredit untuk golongan miskin di pedesaan Indonesia. Skim ini adalah replikasi pola Grameen Bank, Bangladesh, dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia. Kaji tindak ini berlokasi di kecamatan Nanggung, Bogor. Proyek ini dimulai pada bulan Januari 1989 – 1991 oleh Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Pada dasarnya kredit diberikan secara individu, tapi untuk memperoleh kredit calon peserta/peminjam diharuskan berkumpul dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota. Selama periode kaji tindak, KUM telah menjangkau 7 dari 10 desa yang ada di kecamatan Nanggung dengan total anggota sebanyak 329 orang. Dari jumlah ini 290 orang (88%) adalah anggota wanita dan 29 orang (12%) adalah anggota pria. Adapun jumlah pinjaman yang disalurkan sebanyak Rp 22.945.000,-, dengan rata-rata pinjaman per anggota adalah Rp 69.741,- dan kisaran pinjaman antara Rp 50.000,- sampai Rp 125.000,- per anggota. Pelajaran yang menarik dari pengalaman kaji tindak ini adalah bahwa kendatipun kelompok sasarannya adalah golongan termiskin di pedesaan, tetapi mereka mampu mengembalikan pinjaman dengan teratur dan berdisiplin. Selain itu mereka juga mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Dengan kata lain golongan miskin di pedesaan, khususnya kaum wanita, adalah layak diberikan kredit.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan bidang ekonomi selama empat Pelita telah menampakkan hasil yang nyata. Keberhasilan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Indikator yang sering dipakai untuk menunjukkan tingkat keberhasilan adalah pendapatan dan kesempatan kerja.

Data BPS menunjukkan bahwa selama empat Pelita struktur pendapatan, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan telah mengalami perubahan. Sejalan dengan itu peta kemiskinanpun telah berubah. Hingga akhir Pelita IV (1989) rakyat miskin tinggal 30 juta atau 17 persen dari jumlah penduduk. Mereka ini sebagian besar tinggal dan mencari penghidupan di daerah pedesaan.

Sisi lain yang dapat diamati adalah bahwa perekonomian pedesaan cenderung mengarah pada *monetized economy*. Keadaan ini telah meningkatkan peranan uang sebagai salah satu alat transaksi.

Pada keadaan demikian peranan kapital sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Akibatnya distribusi penguasaan kapital merupakan salah satu determinan distribusi pendapatan. Yunus (1987) mengatakan bahwa kredit adalah hak asasi manusia yang paling dasar. Pernyataan ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa dengan bantuan kredit, seseorang atau rumah tangga akan dapat mengoptimalkan keterampilan dan kemampuan yang ada padanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Implikasi yang dapat ditarik dari keadaan ini adalah bahwa salah satu upaya untuk perataan kesempatan kerja dan pendapatan adalah perataan penguasaan kapital. Dengan demikian upaya mem-

*) Staf Peneliti, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Sejak 1989 – 1991 sebagai Manajer pada Pilot Proyek Karya Usaha Mandiri.

buka akses golongan masyarakat termiskin kepada fasilitas kredit secara konsepsional merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengangkat mereka dari garis kemiskinan.

Kendatipun transformasi ke arah "*monetized economy*" merupakan aliran yang dominan tetapi tercecernya sebagian masyarakat (terutama golongan miskin) pada keadaan yang mengalami stagnasi juga terlihat. Golongan ini masih berkuat dengan keterbelakangan berikut akibat sampingannya. Gerak ekonomi mereka yang lambat memerlukan pendekatan yang non-konvensional. Pendekatan tersebut haruslah berpangkal dari jati diri golongan miskin, yaitu miskin pendidikan, miskin harta (untuk jaminan) dan miskin segalanya, tetapi mereka sarat dengan pengalaman bagaimana mempertahankan hidup dengan kondisi yang ada pada mereka.

METODA PENDEKATAN MASALAH

Mengapa KUM

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, untuk menjangkau golongan miskin maka diperlukan cara pendekatan non-konvensional untuk melayani kredit pada golongan miskin dengan memperhatikan jati diri kelompok miskin, yaitu masalah agunan, penjamin, prosedur pengajuan dan pengembalian. Program ini disebut Karya Usaha Mandiri (KUM), suatu *non-conventional approach on credit*. Program ini dimulai pada bulan Januari tahun 1989 hingga 1991.

KUM dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Dana operasional berasal dari Asian and Pacific Development Centre (APDC) dan dana kredit (*seed capital*) berasal dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Skim ini adalah Replikasi Pola Grameen Bank, Bangladesh dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia.

Perbedaan yang sangat mendasar antara Skim KUM dengan Skim-Skim bank konvensional terletak pada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah atau anggota. Skim bank konvensional mensyaratkan *batas minimum*, misalnya minimum pendapatan, minimum agunan dan lain-lain. Sementara itu Skim KUM mensyaratkan *batas maksimum*, yaitu pendapatan maksimum, pemilik-

an aset dan maksimum pemilikan lahan. Pada prinsipnya kredit Skim KUM diberikan dan digunakan secara individu/perorangan, namun untuk dapat memperoleh kredit, calon peserta diwajibkan tergabung dalam satu kelompok.

Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan melalui kelompok mempunyai potensi yang besar untuk menjangkau golongan miskin. Ada beberapa sebab mengapa kredit kelompok mempunyai potensi yang besar untuk berhasil dalam menjangkau golongan miskin. Pertama, kelompok dapat berfungsi sebagai penjamin. Lebih dari itu melalui kelompok akan terjadi interaksi, saling tenggang rasa, menghargai dan menjaga diri sehingga timbul rasa disiplin dan kebersamaan dalam memenuhi kewajiban sebagai penerima kredit yang harus melunasi pinjaman tepat waktu. Kedua, karena pinjaman disalurkan melalui kelompok, maka biaya transaksi menjadi lebih murah. Namun demikian kisah sukses kredit yang ditujukan untuk perorangan juga banyak ditemui, misalnya Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur dan lain-lain (Tim Patanas, 1989 dan Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1987).

Lokasi KUM

KUM berlokasi di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Kecamatan ini terletak 40 km sebelah Barat Daya kota Bogor, dapat ditempuh 1,5 jam dari Bogor dengan menggunakan kendaraan roda empat. Nanggung terdiri dari 10 desa, yang merupakan pemekaran kecamatan Leuwiliang sejak tahun 1981. Pertanian merupakan usaha dominan di daerah ini. Mobilitas penduduk ke kota kabupaten (Bogor) dan Jakarta relatif tinggi.

Hingga tahun 1988, kecamatan Nanggung belum banyak tersentuh program kredit, kecuali Bimas, KIK dan KCK. Itupun tersebar hanya pada desa-desa yang aksesibilitas transportasinya cukup tinggi, yaitu Parakan Muncang, Nanggung, Hambaro dan Curugbitung. Mengingat jumlah kredit yang macet cukup besar, program-program kredit tersebut mulai tahun 1989 mulai mengurangi kegiatannya. Bahkan BRI Unit Desa yang pada mulanya membuka kantor di kecamatan Nanggung, pada tahun yang sama hanya menempatkan pos pelayanan desa dan membuka kegiatannya 3 hari setiap minggu.

SKIM PINJAMAN KARYA USAHA MANDIRI

Prinsip-prinsip KUM

Tiga prinsip KUM adalah: (1) tidak memerlukan jaminan dan penjamin, (2) peminjam dikenakan biaya administrasi, dan (3) apabila peminjam meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk membayar sisa pinjaman (peminjam dibebaskan dari kewajiban membayar hutang). Dari pengalaman selama ini, penjelasan makna prinsip-prinsip tersebut kepada setiap calon peserta KUM mempunyai dampak yang besar. Menurut pengalaman, dampak yang sangat dominan akan terasa manakala pelaksana KUM menjelaskan prinsip pertama dan ketiga. Prinsip pertama akan segera memberi rasa bangga kepada mereka bahwa mereka mulai dipercaya untuk dapat memperoleh "kredit formal" dengan tanpa agunan dan penjamin. Hal ini mendorong calon anggota untuk mulai mempertimbangkan KUM sebagai tempat sumber modal bagi usaha yang sedang dan akan dijalankan.

Prinsip ketiga sepintas mirip dengan berderma. Namun justru prinsip ini secara psikologis telah banyak mendorong masyarakat untuk bergabung dengan KUM. Artinya calon anggota tidak ragu-ragu lagi untuk mulai mengikuti dan mempertimbangkan Skim pinjaman kredit dari KUM. Bagi calon anggota, dia merasa bahwa kalau terjadi sesuatu terhadap dirinya, dalam hal ini meninggal, maka dia tidak meninggalkan beban kepada anggota keluarga yang ditinggalkan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa prinsip ini mempunyai "kekuatan" yang sangat besar untuk digunakan sebagai salah satu usaha membuka akses masyarakat berpendapatan rendah kepada pelayanan kredit, khususnya pada kasus kecamatan Nanggung.

Tahap-tahap Pelaksanaan

Tahap-tahap pelaksanaan program kredit Skim KUM, adalah:

a. *Pertemuan umum*

Pertemuan ini diadakan untuk memberikan informasi tentang adanya program KUM. Diusahakan semaksimal mungkin agar semua aparat pemerintahan setempat, tokoh masyarakat dan penduduk yang tergolong miskin (berdasarkan kondisi rumah) hadir pada pertemuan tersebut. Materi yang dijelaskan pada acara ini adalah tujuan umum, sa-

saran dan syarat-syarat keanggotaan bagi calon peserta KUM.

b. *Uji kelayakan*

Uji kelayakan adalah semacam kegiatan untuk "memotret" kondisi sosial ekonomi calon peserta, yang meliputi keadaan rumah, anggota rumah tangga, pekerjaan dan pendapatan. Informasi ini dijaring melalui survey dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon peserta adalah benar-benar termasuk kategori sasaran KUM.

c. *Pembentukan kumpulan*

Kumpulan adalah kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang relatif sama. Diusahakan agar anggota kumpulan mempunyai tingkat pendidikan dan umur yang tidak terlalu berbeda jauh, bertempat tinggal berdekatan dan tidak memiliki hubungan darah yang dekat (misalnya bapak-anak, adik-kakak). Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa dengan syarat-syarat ini akan dihasilkan kumpulan yang kokoh, saling percaya dan kontrol antar anggota akan lebih baik.

d. *Latihan wajib kumpulan (LWK)*

LWK adalah salah satu tahapan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap calon anggota KUM. Setelah anggota membentuk kumpulan, maka mereka wajib mengikuti LWK. LWK berlangsung selama 5 hari (1 jam/hari) dan diakhiri dengan Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK). Dalam LWK dijelaskan: (1) semua persyaratan dan tata-cara Skim pinjaman KUM; (2) memilih Ketua dan Sekretaris Kumpulan; (3) menentukan dua anggota yang berhak memperoleh pinjaman lebih dahulu; (4) menentukan nama kumpulan.

Secara keseluruhan LWK bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan sesama anggota, disiplin dan tanggung jawab. Setelah mereka dinyatakan lulus LWK, maka kumpulan berhak untuk membentuk Rembug Pusat (RP). Apabila dalam UPK beberapa anggota masih belum paham tentang materi LWK, maka LWK akan diperpanjang waktunya sehingga semua calon anggota mengerti dan memahami semua materi LWK.

e. *Rembug pusat (RP)*

Rembug Pusat adalah gabungan beberapa kumpulan, minimal terdiri dari 2 kumpulan (10 anggota) dan maksimal 6 kumpulan (30 anggota). Rembug Pusat mengadakan pertemuan satu kali seminggu.

Pada pertemuan RP inilah semua kegiatan KUM dilaksanakan, yaitu pengajuan dan penyerahan pinjaman, pembayaran angsuran dan menabung.

Prosedur Perolehan dan Pengembalian Pinjaman

Untuk memperoleh pinjaman Skim KUM calon anggota harus membentuk Rembug Pusat (RP) yang minimal terdiri dari 2 kumpulan, masing-masing kumpulan beranggota 5 orang. Ini berarti sebelum membentuk RP maka anggota harus membentuk kumpulan terlebih dahulu. Sebelum anggota membentuk kumpulan calon anggota harus telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan.

Meskipun anggota harus membentuk kumpulan, tetapi pada prinsipnya pinjaman dari KUM digunakan secara perorangan. Pengajuan pinjaman dilakukan di pertemuan Rembug Pusat yang wajib dihadiri oleh semua anggota kumpulan. Apabila ada satu anggota kumpulan yang mengajukan pinjaman, maka 4 (empat) anggota lainnya harus menyetujui dengan cara membubuhkan tanda tangan pada borang (formulir) pengajuan pinjaman. Dengan demikian diharapkan anggota ini akan ikut mengontrol dan bagi anggota yang meminjam akan merasa dikontrol oleh anggota lain.

Adapun pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur setiap minggu selama 50 minggu atau 50 kali angsuran dengan masa tenggang (*grace period*) 2 minggu. Pinjaman Skim KUM dikenakan biaya administrasi sebesar 3,33% per bulan atau 40% per tahun.

Sebagaimana pengajuan pinjaman, maka angsuran pinjaman Skim KUM juga dilakukan pada pertemuan Rembug Pusat. Formula yang dipakai Skim KUM untuk menghitung besarnya angsuran adalah sebagai berikut:

$$A = \frac{P(1+r)}{50}, \text{ dimana}$$

- A = besarnya angsuran/minggu (Rp)
- P = besarnya pinjaman yang disetujui (Rp)
- r = biaya administrasi (40%/tahun)
- 50 = konstanta

Sebagai contoh apabila anggota meminjam sebesar Rp 25.000,- maka angsuran mingguan adalah Rp 700,-. Angka ini diperoleh dengan cara:

$$A = \frac{P(1+r)}{50}$$

$$A = \frac{\text{Rp } 25.000 (1 + 0,4)}{50}$$

$$A = \frac{\text{Rp } 25.000 (1,4)}{50}$$

$$A = \frac{\text{Rp } 35.000,-}{50} = \text{Rp } 700,-$$

PINJAMAN, TABUNGAN DAN TINGKAT PENGEMBALIAN

Sampai dengan 31 Desember 1991 KUM telah menjangkau 7 desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Nanggung. Ini berarti bahwa 70% dari jumlah desa telah dilayani oleh Skim pinjaman KUM. Dari 7 desa ini anggota KUM berjumlah 329 orang, 290 orang atau 88% adalah anggota wanita dan sisanya 29 orang atau 12% adalah anggota pria. Jumlah anggota tersebut tergabung dalam 66 kumpulan (groups) atau 19 Rembug Pusat (Centres). Ini berarti bahwa setiap Rembug Pusat kurang lebih terdiri dari 3 kumpulan atau 15 anggota.

Untuk mengelola dan menjangkau anggota sejumlah itu, KUM didukung oleh 5 orang pelaksana, yaitu 1 orang manager dan 4 orang petugas lapang, 1 diantaranya adalah wanita.

Pinjaman

Penyerahan pinjaman pertama kepada 2 (dua) anggota pertama dilaksanakan pada tanggal 2 November 1989. Masing-masing anggota meminjam Rp 25.000,-. Batas maksimum pinjaman untuk pinjaman I adalah Rp 30.000/anggota, dengan kemungkinan memperoleh pinjaman dua kali lipat pada pinjaman kedua apabila pinjaman pertama diangsur dengan teratur. Sejak tahun 1991 pinjaman pertama dinaikkan menjadi Rp 50.000,-/anggota, dengan kemungkinan memperoleh pinjaman kedua sebesar Rp 75.000,-.

Besarnya bunga, dalam KUM disebut biaya administrasi, yang dikenakan kepada anggota adalah 3,33% per bulan. Disadari dari sejak awal bahwa besarnya biaya administrasi ini akan mengundang kritik dan debat diantara masyarakat perbankan atau siapa saja yang mempunyai perhatian besar pada masalah pembangunan pedesaan, khususnya program-program untuk golongan miskin. Bahkan Prof. M. Yunus (Grameen Bank) dan Dr.

I.P. Getubig (APDC), yang telah mengunjungi KUM pada Februari 1990 juga memberikan perhatian terhadap masalah ini.

Sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1, sampai 31 Desember 1991 jumlah pinjaman yang telah disalurkan adalah sebesar Rp 22.945.000,-. Ini berarti rata-rata pinjaman per anggota adalah Rp 69.741,- dengan besar pinjaman berkisar antara Rp 50.000,- sampai Rp 125.000,- per anggota.

Dari jumlah anggota sebanyak 329 orang, 137 anggota telah melunasi pinjaman pertama dan memperoleh pinjaman kedua. Besarnya pinjaman kedua berkisar antara Rp 35.000,- sampai Rp 75.000,-. Dari jumlah ini 9 orang telah melunasi pinjaman kedua. Besarnya pinjaman berkisar antara Rp 75.000,- sampai dengan Rp 125.000,- per orang.

Berkaitan dengan penyaluran pinjaman ini, pada Tabel 2 dikemukakan perkembangan volume kredit yang disalurkan selama 1989 – 1991. Pada Tabel 2 tampak bahwa pertambahan volume kredit terjadi sangat cepat pada semester kedua tahun 1990 dan pertambahan terbesar terjadi pada semester pertama tahun 1991. Selanjutnya menurun pada semester dua tahun 1991.

Kenaikan volume kredit yang lambat pada semester pertama 1990 disebabkan oleh karena pada bulan-bulan tersebut KUM masih dalam tahap inisiasi untuk memperkenalkan program. Bahkan pada semester pertama tahun 1989 (Juli sampai Desember 1989) baru dapat diserahkan pinjaman sebesar Rp 275.000,-. Namun volume kredit kemudian melonjak pada semester kedua 1990. Nilai volume kredit pada semester ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada semester pertama pada tahun yang sama.

Melalui perubahan strategi pengembangan, yang semula mengandalkan penambahan jumlah anggota per Rembug Pusat dan dirubah menjadi pembentukan Rembug Pusat-Rembug Pusat baru di desa-desa lain, maka jumlah anggota KUM menjadi lebih cepat pertambahannya. Konsekuensi logis dari keadaan ini adalah meningkatnya volume kredit hampir empat kali lipat pada semester pertama tahun 1991.

Apabila dilihat secara keseluruhan, sebenarnya penambahan volume kredit yang cepat tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh perubahan strategi pengembangan, tetapi juga oleh adanya anggota yang sudah selesai pinjaman pertama dan

Tabel 1. Posisi pinjaman, pengembalian, tabungan dan anggota per 31 Desember 1991 (dalam rupiah).

No. Uraian	Jumlah		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1. Volume kredit yang disalurkan	4.030.000	18.915.000	22.945.000
2. Nilai kredit yang dibayar kembali	2.825.800	10.259.750	13.085.550
3. Kredit yang belum dibayar setelah 1 tahun penyaluran pinjaman (Rp)	0	0	0
4. Jumlah anggota yang lunas pinjaman I	36	101	137
5. Jumlah anggota yang lunas pinjaman II	6	3	9
6. Sisa kredit (1 – 2)	1.204.200	8.655.250	9.859.450
7. Biaya administrasi	1.109.550	4.087.800	5.197.350
8. Total tabungan	1.058.300	4.672.250	5.730.550
9. Total pinjaman dari dana tabungan	723.800	3.265.600	3.989.400
10. Jumlah anggota	39	290	329
11. Jumlah kumpulan	8	58	66
12. Jumlah Rembug Pusat	3	16	19

Tabel 2. Perkembangan volume kredit kumulatif yang disalurkan Karya Usaha Mandiri, 1989 – 1991.

Bulan	Volume kredit (Rp)	Kenaikan (Rp)
Desember 1989	275.000	—
Juni 1990	1.435.000	1.160.000
Desember 1990	4.090.000	2.655.000
Juni 1991	12.295.000	8.205.000
Desember 1991	22.945.000	10.650.000

memperoleh pinjaman kedua pada semester tersebut.

Tingkat Pengembalian

Salah satu indikator keberhasilan dalam kaji tindak (action research) ini adalah tingkat pengembalian pinjaman. Yang dimaksud dengan tingkat pengembalian adalah perbandingan antara jumlah uang yang nyata dibayar kembali dengan jumlah uang yang seharusnya dibayar kembali (menurut jadwal angsuran) selama periode satu tahun pinjaman.

Apabila batasan ini digunakan, maka sampai saat ini tingkat pengembalian adalah 100%. Hal ini terlihat pada Tabel 1 butir 3, yaitu jumlah pinjaman yang tidak dibayar setelah satu tahun penyerahan pinjaman adalah 0. Bahkan rata-rata anggota dapat melunasi pinjaman selama 11 bulan atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Tabungan Dana Kumpulan (TDK)

Tabungan Dana Kumpulan (TDK) dalam KUM terdiri dari 4 (empat) sumber yaitu:

1. Tabungan wajib selama mengikuti Latihan Wajib Kumpulan (LWK).
2. Tabungan wajib mingguan (Rp 100,-/minggu).
3. 5% potongan dari jumlah pinjaman.
4. Biaya administrasi dari pinjaman dana kumpulan.

Sampai dengan 31 Desember 1991 jumlah TDK adalah Rp 5.730.550,-, terdiri dari Rp 1.058.300,- (18%) tabungan anggota pria dan Rp 4.672.250 (82%) tabungan anggota wanita.

TDK ini sangat bermanfaat bagi anggota KUM. Mereka dapat meminjam dari TDK atas persetujuan anggota kumpulan. Pinjaman dari TDK dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang produktif maupun konsumtif. Tetapi umumnya pin-

jaman dari TDK digunakan untuk tujuan konsumtif, misalnya untuk berobat, membayar uang sekolah anak dan sebagainya. Mendekati hari-hari penting, misalnya hari raya atau tahun ajaran baru, jumlah pinjaman dari TDK umumnya meningkat cepat.

Pengembalian pinjaman dari TDK dilakukan sebanyak 10 kali angsuran atau 10 minggu. Pengajuan dan pengembalian pinjaman dilakukan pada Pertemuan Rembug Pusat (*Weekly Centre Meeting*). Pinjaman ini dikenakan biaya administrasi sebesar 5% untuk waktu 10 minggu, dan merupakan sumber untuk TDK.

Sampai dengan akhir Desember 1991, besarnya pinjaman dari TDK adalah Rp 3.989.400,- atau 69% dari total TDK (lihat Tabel 1 butir 9).

Jenis tabungan lain yang diinginkan anggota tetapi belum dapat direalisasi oleh KUM sampai akhir 1991 adalah Tabungan Sukarela. Tabungan ini adalah tabungan perorangan. Keinginan untuk mempunyai tabungan ini adalah untuk wadah menyimpan uang setiap minggu dari kelebihan hasil usahanya. Dengan demikian mereka bermaksud untuk menabung yang sewaktu-waktu dapat diambil apabila diperlukan. Mengingat tenaga yang sangat terbatas dan administrasinya memerlukan pemikiran lebih lanjut, maka jenis tabungan ini belum dapat dilaksanakan. Namun demikian hal ini sudah mulai dipikirkan dan dibahas secara informal di berbagai kesempatan, baik pada tingkat pelaksana maupun dengan Tim Teknis KUM. Direncanakan jenis tabungan ini dapat direalisasi pada tahun 1992/1993.

PROSPEK DAN KENDALA PENGEMBANGAN

Prospek Pengembangan

Seperti yang telah dikemukakan, KUM adalah program kredit yang dirancang khusus untuk mencoba menjangkau golongan miskin di pedesaan. Disisi lain komitmen nasional (pemerintah) terhadap masalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dan partisipasi semua golongan masyarakat dalam pembangunan semakin jelas. Bahkan akhir-akhir ini masalah kemiskinan dan pemerataan menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam berbagai kesempatan.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah guna membuka akses masyarakat golongan miskin terhadap fasilitas kredit yang terse-

dia. Namun masih tetap disadari bahwa golongan termiskin masih banyak yang belum terjangkau oleh fasilitas pelayanan kredit. Padahal sebenarnya mereka memiliki ketrampilan di berbagai kegiatan ekonomi dan sanggup bekerja keras untuk hidup layak dan mandiri. Namun seringkali keterampilan itu tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin karena keterbatasan dana.

Melihat keragaan KUM selama ini, banyak kalangan yang memberikan komentar, baik yang bernada optimis maupun pesimis. Selama ini KUM dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh supervisi yang intensif dan wilayah kerjanya masih terbatas hanya dalam satu kecamatan. Bagaimana kalau jangkauan wilayahnya semakin luas, apakah juga masih dapat dikelola dengan baik? Selain itu masih perlu diuji apakah pada daerah lain yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kecamatan Nanggung, model Skim kredit KUM masih dapat dilaksanakan. Lebih dari itu semua, apakah program ini layak secara ekonomi. Artinya, tanpa mengurangi prinsip-prinsip yang digunakan, apakah program ini dapat membiayai semua pengeluaran untuk pelaksana dan biaya-biaya lain, sehingga program ini dapat mandiri.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji manakala diangkat ke tingkat yang lebih makro. Program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa. Pemerintah, swasta ataukah masyarakat? Jawabannya dapat bermacam-macam. Tetapi apabila disepakati bahwa mengurangi tingkat kemiskinan adalah tanggungjawab masyarakat, maka biaya untuk itu harus ditanggung oleh masyarakat, walaupun pelaksanaannya mungkin dikontrol oleh pemerintah.

Bentuk pelaksanaannya dapat bermacam-macam. Salah satu bentuk kebijakan makro yang telah diputuskan oleh pemerintah dalam kaitannya menjangkau golongan kecil melalui kredit adalah diterbitkannya Paket Maret 1990. Salah satu butir Paket Maret 1990 adalah adanya keharusan Bank-bank Umum mengalokasikan 20 persen dari volume kreditnya untuk pengusaha kecil. Kredit ini disebut Kredit Usaha Kecil (KUK). Namun hingga kini pelaksanaan paket tersebut terasa lambat, mengingat untuk menjangkau pengusaha kecil diperlukan perangkat aturan yang lebih rinci. Selain itu kesiapan bank-bank tersebut untuk menyalurkan kredit pada pengusaha kecil masih rendah mengingat pengalaman untuk itu masih belum

memadai. Untuk memecahkan masalah ini, banyak bank umum bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menyalurkan KUK.

Program KUM merupakan salah satu model perkreditan bagi lapisan masyarakat miskin yang masih perlu dikaji pengembangannya ke daerah yang lebih luas. Bahkan Skim KUM itu sendiri dengan segala persyaratan dan prosedurnya masih perlu dikaji. Dengan kaji tindak ini diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pengembangan program untuk waktu yang akan datang, baik pengembangan di daerah Nanggung dan sekitarnya maupun lokasi lain.

Kendala Pengembangan

Pengalaman kaji tindak ini menunjukkan bahwa beberapa faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program ini dapat dikelompokkan dalam 2 aspek, yakni (1) aspek ekonomi, dan (2) aspek sosial. Aspek ekonomi meliputi: karakteristik ekonomi wilayah, ragam sumber pendapatan penduduk, penyebaran pemukiman dan kondisi prasarana transportasi. Sedangkan aspek sosial meliputi kebiasaan berkelompok, dukungan tokoh formal dan informal setempat, dan kualitas pelaksana.

Skim pinjaman KUM mempunyai ciri-ciri antara lain: (1) pendekatan kelompok, meskipun pinjaman digunakan secara perorangan, (2) mengutamakan calon anggota yang mempunyai pekerjaan yang bersifat "cepat menghasilkan".

Beranjak dari ciri-ciri di atas, maka realisasi kredit dan tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh kecepatan pembentukan dan kualitas kumpulan. Kecepatan pembentukan kumpulan ini dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial dan ekonomi seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Apabila karakteristik wilayah didominasi oleh pertanian, sumber pekerjaan di luar pertanian sangat terbatas dan pemukiman penduduk sangat tersebar, maka proses konsolidasi calon peserta untuk membentuk calon peserta akan membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi bila hal ini tidak didukung oleh kebiasaan berkelompok masyarakat setempat.

Pada daerah-daerah yang pemukiman penduduknya terkonsentrasi pada suatu tempat, maka bagi pelaksana akan lebih mudah untuk melakukan konsolidasi calon peserta. Dengan demikian pembentukan kumpulan akan lebih cepat. Namun tetap disadari bahwa tidak hanya faktor pemukim-

an yang mempengaruhi tetapi juga faktor-faktor lain. Sarana transportasi yang baik akan mempengaruhi mobilitas pelaksana dalam mencari calon peserta yang layak menjadi anggota KUM.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam keberhasilan program KUM adalah dukungan dari tokoh formal dan informal daerah setempat. Selama ini faktor tersebut mendukung secara moril, tetapi tidak ikut campur tangan secara teknis dalam pelaksanaannya, baik penentuan calon peserta maupun dalam pembentukan kumpulan. Dengan demikian pelaksana dapat secara leluasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUM.

Berdasarkan pengalaman KUM dan pengalaman dari lembaga lain yang telah mereplikasi program yang sama, terlihat bahwa pola kerja KUM memerlukan dedikasi tinggi, mencintai dan menghayati kehidupan kelompok lapisan miskin dan dapat memotivasi calon peserta agar mereka mau secara sadar menerima dan mengikuti program KUM. Tanpa ciri-ciri ini maka akan sulit untuk meyakinkan calon peserta menjadi anggota KUM, yang pada gilirannya akan memperlambat proses pembentukan kumpulan dan realisasi pinjaman.

Terlepas dari itu semua, sebenarnya program berfokus kemiskinan, khususnya di Indonesia, masih banyak yang harus dilakukan. Program-program untuk mengurangi tingkat kemiskinan tidak dapat dipisahkan dengan program-program lain dalam konteks pembangunan ekonomi, seperti penciptaan kesempatan kerja. Seyogyanya program-program yang demikian tidak dilaksanakan secara partial, tetapi menggunakan pendekatan holistik dan terintegrasi satu dengan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kaji tindak "Karya Usaha Mandiri" telah memberikan beberapa pengalaman yang berkaitan dengan Pelayanan Kredit kepada golongan miskin di pedesaan, yaitu:

- (1) Kendatipun kelompok sasaran adalah golongan termiskin, tetapi mereka mampu mengembalikan pinjaman dengan teratur dan berdisiplin. Selain itu mereka juga mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Dengan kata lain, sebenarnya golongan termiskin adalah layak untuk diberikan kredit (*bankable*).
- (2) Kaum wanita, yang selama ini dianggap kelompok lemah di pedesaan, ternyata lebih mampu

dan berdisiplin dalam mengembalikan pinjaman. Dengan demikian, wanita pedesaan dapat berperan ganda. Di satu pihak sebagai ibu rumah tangga dan di pihak lain sebagai "jembatan" keluarga untuk akses pada fasilitas pelayanan kredit guna membiayai usaha suaminya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

- (3) Skim pinjaman KUM dapat berjalan dengan baik karena mempunyai kelompok sasaran (*target group*) yang jelas. Keberhasilan juga didukung oleh suatu aturan yang memungkinkan adanya keterbukaan antara petugas KUM dan anggota. Keterbukaan ini makin lama akan menumbuhkan rasa dan sikap saling percaya antara petugas dan anggota. Pada akhirnya sikap ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program-program yang berorientasi kredit, karena pada dasarnya *kredit itu berarti percaya*.
- (4) Agar Skim pinjaman KUM dapat diperluas untuk daerah-daerah lain, maka perlu diupayakan untuk mencoba mereplikasi pada daerah-daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kecamatan Nanggung. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang lengkap tentang kesahihan (*validitas*) model KUM untuk daerah-daerah lain di Indonesia.
- (5) Sejauh ini keanggotaan KUM masih berlandaskan pada usaha-usaha yang "cepat menghasilkan" (*cashflow* nya pendek). Untuk itu perlu diupayakan agar untuk waktu yang akan datang Skim pinjaman KUM mulai mencoba untuk melakukan pendekatan pada usaha-usaha yang *cashflow* nya musiman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang dianut. Dengan demikian KUM akan dapat menjangkau semua lapisan miskin tanpa membedakan jenis usaha calon peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1987. *Proyek Penelitian Pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan*. Laporan Daerah Jawa Timur. Kerjasama LPPI - Puslit Agro Ekonomi, Bogor.
- Syukur, Mat., dkk., 1990. *Pola Pelayanan Kredit Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Pedesaan Jawa Barat*. Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Tim Patanas, 1989. *Hasil Penelitian Lembaga Perkreditan di Propinsi Jawa Barat*. Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Yunus, M. 1987. *Credit for Self-Employment : A Fundamental Human Right*. Grameen Bank, Bangladesh.